

Dinamika *Collaborative Governancedalam* Pengelolaan Wisata Alam (Studi Pada Wisata Air Terjun Tumpak Sewu Kabupaten Lumajang)

Dhea Vanny Andarista^{1*}, Hadi Prayitno², Selfi Budi Helpiastuti³

^{1*,2,3} Universitas Jember

Corresponding Author's e-mail : dheavanny1709@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 3611 - 3625

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4218>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4218>

Article History:

Received: 03-09-2026

Revised: 28-09-2026

Accepted: 14-10-2026

Abstract : Tourism destination management involves multiple stakeholders and contributes to increasing Regional Original Revenue (PAD). Tumpak Sewu Waterfall Tourism in Lumajang Regency is a rapidly developing destination that has gained international recognition. This study addresses a gap in previous collaborative governance studies of tourism, which have largely examined actor roles, communication, and digitalization in tourism villages or cultural destinations, while the dynamics of collaboration in a nature-based waterfall destination and the strategic role of media as an active collaborative actor remain less explicitly examined. This study aims to analyze the dynamics of collaborative governance in the management of Tumpak Sewu Waterfall Tourism. A qualitative research method with a phenomenological approach was employed to gain an in-depth understanding of the collaborative processes among stakeholders. The findings reveal that collaboration occurs through five stages: face-to-face dialogue, trust building, commitment to the collaborative process, shared understanding, and interim outcomes. The collaboration has generated significant achievements, including tourism awards and wider destination recognition. Although all stakeholders play important roles, the media has emerged as a particularly influential actor, especially in promoting the destination through digital content and increasing its international visibility. Theoretically, this study contributes an empirical explanation of how the five-stage collaborative process operates in a nature-based tourism context and how digital media can strengthen collaborative outcomes. Practically, it highlights the need for routine cross-stakeholder forums, clearer role coordination, and structured collaboration with digital media actors to support sustainable destination management. **Keywords** : Collaborative Governance, Nature-based Tourism, Stakeholders

Keywords : Collaborative Governance, Nature-based Tourism, Stakeholders

Abstrak : Pengelolaan destinasi wisata melibatkan berbagai pihak dan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wisata Air Terjun Tumpak Sewu Kabupaten Lumajang merupakan destinasi yang berkembang pesat dan telah dikenal secara internasional. Penelitian ini mengisi celah pada studi collaborative governance pariwisata sebelumnya yang banyak membahas peran aktor, komunikasi, dan digitalisasi pada desa wisata atau destinasi budaya, sementara dinamika kolaborasi pada destinasi wisata alam air terjun serta posisi media sebagai aktor aktif dalam proses kolaborasi belum banyak dijelaskan secara khusus. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika collaborative governance dalam pengelolaan Wisata Air Terjun Tumpak Sewu. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk memahami secara mendalam proses kolaborasi antarpihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi berlangsung melalui lima tahapan, yaitu dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman

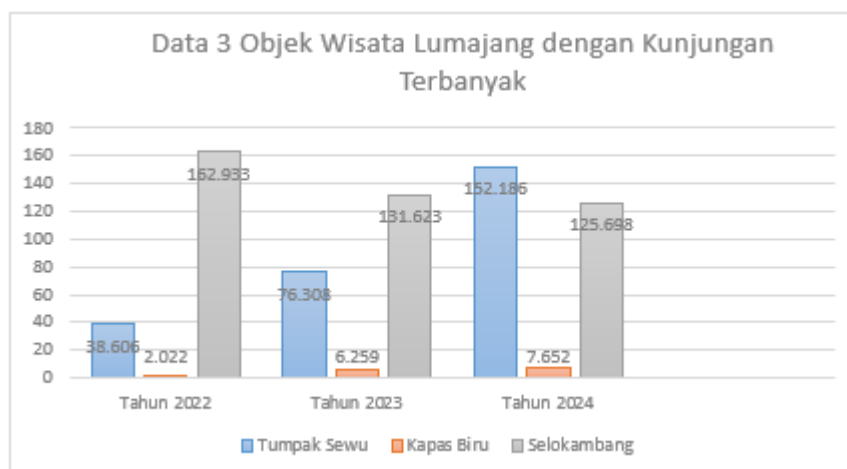
bersama, dan pencapaian hasil sementara. Kolaborasi telah menghasilkan berbagai capaian, termasuk penghargaan pariwisata dan pengenalan destinasi yang semakin luas. Meskipun seluruh pihak memiliki peran penting, media menjadi aktor yang sangat berpengaruh, khususnya dalam memperluas promosi destinasi melalui konten digital hingga tingkat internasional. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman empiris mengenai bagaimana proses kolaborasi lima tahap bekerja dalam konteks wisata alam dan bagaimana media digital dapat memperkuat hasil kolaborasi. Secara praktis, penelitian ini menekankan pentingnya forum lintas aktor yang rutin, pembagian peran yang lebih jelas, dan kerja sama yang lebih terstruktur dengan aktor media digital untuk mendukung pengelolaan destinasi yang berkelanjutan. Kata Kunci : Tata Kelola Kolaboratif, Wisata Alam, dan Stakeholders

Kata Kunci : Tata Kelola Kolaboratif, Wisata Alam, dan Stakeholders

PENDAHULUAN

Industri pariwisata yang berkembang dengan pesat memberikan pemahaman dan pengertian antar budaya melalui interaksi pengunjung wisata (turis) dengan masyarakat lokal tempat daerah wisata tersebut berada. Hal tersebut menjadikan para wisatawan dapat mengenal dan menghargai budaya masyarakat setempat dan juga memahami latar belakang kebudayaan lokal yang dianut oleh masyarakat tersebut (Rozikin *et al.*, 2019). Pengembangan pariwisata memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial budaya, salah satunya seperti kemampuan masyarakat dalam menggunakan bahasa asing meningkat, terlestarikannya budaya masyarakat lokal yang dilakukan melalui berbagai kegiatan pagelaran budaya, adat istiadat dan tradisi.

Beragamnya kondisi geografis Indonesia menyebabkan beberapa wilayah memiliki struktur tanah yang khas dan menarik untuk dijadikan tempat wisata, salah satunya Kabupaten Lumajang. Sebuah daerah yang terletak di Provinsi Jawa Timur di kawasan Tapal Kuda dan dikelilingi rangkaian Gunung Semeru dan Gunung Bromo serta dilalui aliran sungai yang kadang kala membawa aliran material dari muntahan lahar Gunung Semeru dengan debit air yang cukup deras. Kondisi geografis Kabupaten Lumajang mulai dari dataran rendah, garis pantai, dan pegunungan membuatnya memiliki banyak potensi tempat wisata, salah satunya yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di media sosial yaitu Air Terjun Tumpak Sewu. Air Terjun Tumpak Sewu memiliki daya tarik tersendiri dengan suguhan aliran air terjun yang terdiri lebih dari satu aliran membentuk lingkaran dengan ketinggian sekitar 120 meter. Wisata ini sedang ramai dikunjungi baik dari wisatawan lokal maupun mancanegara. Hal ini dibuktikan dari data kunjungan wisata Kabupaten Lumajang pada 3 tahun terakhir sebagai berikut (Pemerintah Kabupaten Lumajang, 2016).



Sumber: data.lumajangkab.go.id (2025)

Pada gambar memuat grafik kunjungan pada obyek Wisata Air Terjun Tumpak Sewu, dapat dilihat bahwa kunjungan pada wisata tersebut mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan meningkat drastis pada tahun 2024. Perbandingan antara Wisata Air Terjun Tumpak Sewu dengan wisata yang lain adalah dari kunjungan wisatawan yang terus mengalami peningkatan setiap tahun.

Secara empirik, dalam pengelolaan Wisata Air Terjun Tumpak Sewu melibatkan beberapa aktor. Wisata Air Terjun Tumpak Sewu termasuk wisata yang berada di bawah naungan pengelolaan langsung dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dari BUMDes Sidomulyo dan Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, serta terdapat keterlibatan media dan akademisi dari Perguruan Tinggi yang melakukan riset di lokasi tersebut. Masing-masing aktor memiliki peran yang berbeda dalam pengelolaan Wisata Air Terjun Tumpak Sewu. Adanya keterlibatan dari beberapa aktor dalam pengelolaan wisata alam akan berdampak pada dinamika yang meliputi proses dan hasil dari adanya kerjasama tersebut. Suatu kolaborasi yang dilakukan seharusnya dapat memberikan dampak yang positif bagi semua aktor yang terlibat, utamanya bagi masyarakat sekitar tempat wisata.

Collaborative governance memiliki model sebagai alat analisis kolaborasi antar para stakeholder, salah satunya adalah model collaborative governance dari Ansell dan Gash (2007, p. 550). Menurut Ansell dan Gash (2007, p. 550), model tersebut memiliki empat variabel utama, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Dalam model tersebut, proses kolaborasi menjadi inti analisis, sedangkan kondisi awal, desain kelembagaan, dan kepemimpinan berfungsi sebagai konteks penting yang memengaruhi proses kolaborasi.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dinamika dalam kolaborasi antar aktor di suatu tempat wisata alam yang dituangkan dalam sebuah Karya Ilmiah Tesis dengan judul: “Dinamika *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Wisata Alam (Studi Pada Wisata Air Terjun Tumpak Sewu Kabupaten Lumajang)”.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa collaborative governance telah digunakan dalam pengembangan pariwisata dengan penekanan pada keterlibatan multipihak, komunikasi, dan pemberdayaan. Kirana dan Artisa (2020) menunjukkan pentingnya komunikasi efektif dalam kolaborasi pengembangan desa wisata di Kota Batu. Maulia dan Setiyono (2023) memperlihatkan bahwa proses kolaboratif di Desa Wisata Nglanggeran dapat berjalan baik dan diperkuat oleh digitalisasi, tetapi masih menghadapi persoalan penyelarasan visi, distribusi manfaat, kapasitas sumber daya manusia, dan regenerasi pengelola. Sementara itu, Agasinta et al. (2024) menemukan bahwa pengembangan Museum Kota Lama Semarang masih menghadapi persoalan keanggotaan, komunikasi, dan sumber daya kolaborasi. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan banyak aktor belum otomatis menghasilkan kolaborasi yang terkoordinasi. Dalam konteks Tumpak Sewu, penelitian ini memperluas kajian tersebut dengan menelaah dinamika lima tahapan proses kolaborasi pada destinasi wisata alam sekaligus mengidentifikasi posisi media digital sebagai aktor yang berkontribusi terhadap hasil kolaborasi dan visibilitas destinasi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan data deskriptif berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti dan mendeskripsikan keadaan sifat suatu objek atau gejala tertentu

dengan menggunakan peneliti sebagai instrumen utama, pengumpulan data dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan di lapangan pada saat penelitian (Moleong, 2017). Alasan peneliti menggunakan pendekatan ini karena metode tersebut sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian serta mencapai tujuan penelitian.

Lokasi penelitian ini bertempat di wisata Air Terjun Tumpak Sewu di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Peneliti memilih di lokasi tersebut dikarenakan Wisata Air Terjun Tumpak Sewu merupakan wisata yang terjauh dari pusat kota namun memiliki kunjungan terbanyak selama 3 tahun terakhir, dan kunjungan tersebut didominasi oleh wisatawan mancanegara.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive dimana peneliti memiliki kriteria tertentu untuk menentukan informan penelitian (Creswell, 2014). Adapun kriteria yang ditetapkan meliputi:

1. Informan kunci. Pihak yang memiliki kewenangan dan peran strategis dalam kebijakan dan koordinasi pengelolaan tempat wisata. Yang menjadi informan kunci meliputi:
 - a. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang
 - b. Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang
2. Informan utama. Pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan, pelayanan wisata, atau kerjasama antar lembaga. Yang menjadi informan utama meliputi:
 - a. Kepala Bidang Destinasi di Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang
 - b. Direktur PT. Askrindo Kabupaten Jember
 - c. Anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang
 - d. Pelaku UMKM di sekitar Wisata Air Terjun Tumpak Sewu Kabupaten Lumajang
 - e. Media
 - f. Akademisi
3. Informan tambahan. Pihak yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan tetapi dapat memberikan sudut pandang pelengkap. Yang menjadi informan tambahan meliputi:
 - a. Wisatawan domestik maupun mancanegara
 - b. Tokoh masyarakat yang tidak aktif dalam pengelolaan tetapi mengerti kondisi sosial

Teknik pengumpulan data di sini merupakan cara peneliti untuk mengumpulkan data yang akan dianalisa dan diinterpretasikan untuk menjawab permasalahan penelitian. Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data menurut Creswell (2014), meliputi:

1. Wawancara mendalam
Wawancara mendalam (*deep interview*) merupakan wawancara tanpa alternatif pilihan jawaban dan dilakukan untuk mendalami informasi dari seorang informan dengan menanyakan berbagai hal yang berbeda kepada informan yang sama dengan tujuan mendalami atau klarifikasi informasi yang telah didapat sebelumnya.
2. Observasi
Observasi digunakan untuk meneliti tingkah laku non verbal dengan cara berpartisipasi dan terlibat di dalam kegiatan yang diamati. Selama pelaksanaan observasi, peneliti memposisikan diri sebagai pengamat yang tidak memiliki peran dalam pelaksanaan kegiatan atau biasa disebut sebagai observasi non partisipan.
3. Studi literatur atau dokumentasi

Mengumpulkan dokumen-dokumen yang mendukung hasil penelitian seperti catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Studi dokumentasi memberikan wawasan tentang konteks histori, kebijakan, peristiwa, dan perkembangan yang relevan dengan fenomena yang diteliti

Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dilakukan pada waktu tertentu. Setelah data dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari lapangan, selanjutnya data akan di analisis. Model analisis yang digunakan oleh peneliti adalah model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014), meliputi:

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pemerintah daerah, pemerintah desa, Pokdarwis, pihak swasta, pelaku UMKM, media, akademisi, wisatawan, dan tokoh masyarakat. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara mendalam, observasi nonpartisipan, dan studi dokumentasi. Informasi yang tidak konsisten diperiksa kembali melalui penelusuran dokumen dan klarifikasi kepada informan yang relevan sebelum digunakan dalam penarikan kesimpulan. Dengan demikian, interpretasi temuan tidak hanya bertumpu pada satu sumber atau satu teknik pengumpulan data.

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Data dalam penelitian umumnya berupa narasi deskriptif, tidak ada analisis data secara statistik. Teknik pengumpulan ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris.

3. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Penarikan kesimpulan di sini dilakukan peneliti dari awal peneliti mengumpulkan data seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki pola, mencatat keteraturan penjelasan, dan alur sebab akibat, yang tahap akhirnya disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh peneliti. Kesimpulan atau verifikasi hasil penelitian menjawab fokus penelitian dengan berdasarkan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Wisata Air Terjun Tumpak Sewu ini menggunakan *collaborative governance*, yang mana menurut Ansell dan Gash adalah sebuah proses kegiatan kolaborasi untuk membuat suatu keputusan dengan melibatkan berbagai aktor lembaga publik dan pihak lainnya yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah publik. *Collaborative governance* yang ada di Wisata Air Terjun Tumpak Sewu ini melibatkan berbagai aktor mulai dari Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, Pemerintah Desa Sidomulyo, Pokdarwis Desa Sidomulyo, Askrindo, pemilik homestay dan UMKM masyarakat sekitar.

A. Kondisi awal

Dalam kolaborasi yang terjadi di tempat Wisata Air Terjun Tumpak Sewu, adanya sebuah keharusan pengadaan desa wisata di setiap kecamatan. Akhirnya, Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) di Desa Sidomulyo berinisiatif menjadikan Air Terjun Tumpak Sewu sebagai salah satu wisata dengan masyarakat menyediakan tempat untuk melihat panorama atau pemandangan dari Air Terjun Tumpak Sewu itu sendiri. Pada faktanya, menjalankan wisata tersebut tanpa ada keterlibatan dari pihak lain cukup sulit untuk dilakukan. Pengelola tempat wisata, perlu memahami dasar-dasar dalam mengembangkan tempat wisata itu sendiri, sehingga mereka memerlukan sebuah pelatihan yang mana pelatihan ini disediakan dari Dinas Pariwisata selaku OPD yang memiliki kewajiban akan hal tersebut. Sebuah tempat wisata juga perlu menjamin keselamatan dari pengunjung mereka, terutama wisata alam yang memiliki banyak resiko. Oleh karena itu, keselamatan dari pengunjung perlu dicover melalui asuransi, sehingga perlu diadakannya kerjasama dengan pihak swasta penyedia asuransi jiwa. Setelah tempat wisata itu dianggap siap untuk dikunjungi dengan kondisi yang prima, maka hal yang menjadi tidak kalah penting adalah mengenai bagaimana pengelola bisa mengenalkan wisata tersebut ke seluruh lapisan masyarakat. Maka dalam hal ini diperlukan adanya peran dari media untuk menyebarkan informasi bahwa ada sebuah tempat wisata yang dapat dikunjungi dengan nyaman dan aman. Keterlibatan dari pihak akademisi juga menjadi penting, utamanya jika ada mahasiswa yang sedang melakukan pengabdian di Desa Sidomulyo, maka disaat itulah akan terjadi sebuah proses pembagian ilmu yang mungkin masyarakat butuhkan dan mahasiswa miliki. Dari hal itu akan memberi dampak pada kemajuan pengembangan tempat wisata. Seperti sebuah proyek yang dimiliki oleh mahasiswa KKN berupa pemberian beberapa fasilitas pendukung seperti papan penanda, penyediaan tempat sampah, dan juga praktik bahasa asing akan sangat membantu dalam pengembangan wisata tersebut.

Temuan mengenai kondisi awal menunjukkan bahwa kebutuhan untuk memenuhi tuntutan pengembangan desa wisata menjadi insentif awal bagi Pokdarwis untuk mengembangkan Tumpak Sewu, tetapi pengelola kemudian membutuhkan sumber daya dan kapasitas dari aktor lain. Pola ini memperkuat pandangan Ansell dan Gash bahwa kondisi awal, termasuk insentif dan ketergantungan sumber daya, membentuk peluang sekaligus batas bagi kolaborasi. Temuan ini juga sejalan dengan Kirana dan Artisa (2020) yang menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, media, dan masyarakat melalui pemberdayaan. Perbedaannya, pada Tumpak Sewu kebutuhan keselamatan wisatawan dan promosi destinasi memperluas ketergantungan pengelola pada sektor asuransi dan media, sehingga kondisi awal tidak hanya berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat tetapi juga dengan pengelolaan risiko dan visibilitas destinasi.

B. Desain kelembagaan

Awal mula kolaborasi ini ada karena adanya suatu kewajiban yang tertuang pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Destinasi Wisata Satu Kecamatan Satu Desa Wisata di Kabupaten Lumajang. Kemudian dibentuklah Pokdarwis dengan tujuan sebagai penggerak tempat wisata yang ada di Desa Sidomulyo dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo tentang Penetapan Kelompok Sadar Wisata “Pokdarwis” Tumpak Sewu Semeru. Kemudian suatu tempat wisata diwajibkan untuk menyediakan asuransi bagi pengunjung, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 26 huruf e: Mengatur bahwa setiap pengusaha pariwisata berkewajiban memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, Pokdarwis bekerja sama dengan pihak Askrindo dalam hal penyediaan asuransi jiwa bagi seluruh pengunjung.

Dari sisi desain kelembagaan, penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi daerah dan keputusan pemerintah desa memberikan dasar formal bagi pembentukan Pokdarwis dan kerja sama dengan pihak lain. Namun, keberadaan aturan formal belum sepenuhnya menjamin koordinasi yang rutin. Temuan tersebut dapat dibandingkan dengan Fadlurrahman *et al.* (2022) yang menemukan adanya jaringan aktor yang belum terkoordinasi serta potensi tumpang tindih peran akibat pembagian kerja yang belum jelas dalam pengembangan Desa Ngargogondo. Dengan demikian, kontribusi temuan Tumpak Sewu bukan sekadar menunjukkan keberadaan desain kelembagaan, tetapi memperlihatkan adanya jarak antara legitimasi formal dan mekanisme koordinasi operasional yang perlu diisi melalui forum evaluasi rutin dan pembagian peran yang lebih jelas.

C. Kepemimpinan Fasilitatif

Ansell dan Gash mengungkapkan bahwa kepemimpinan sangat penting untuk merangkul, memberdayakan, dan melibatkan pemangku kepentingan kemudian memobilisasi mereka untuk memajukan kolaborasi. Kesepakatan bersama dan partisipasi setiap *stakeholders* merupakan syarat dari governance. Kepemimpinan merupakan faktor yang sangat berperan dalam membawa *stakeholders* kedalam satu forum untuk mencapai suatu kesepakatan bersama serta membuat mereka semua terlibat. Di Desa Sidomulyo khususnya dalam pengelolaan Wisata Air Terjun Tumpak Sewu terdapat keterlibatan beberapa pihak, maka harus ada satu pihak yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan, dalam hal ini Pemerintah Desa atau kepala desa yang berwenang sebagai pembuat keputusan. Kegiatan yang akan dilaksanakan harus mendapatkan persetujuan dari pihak pemerintah desa, mulai dari pengelolaan, kerjasama, aturan sampai dengan keuangan. Musyawarah dilakukan secara kondisional. Dalam aspek pemberdayaan SDM berada dibawah naungan Dinas Pariwisata. Setelah Pokdarwis menerima pelatihan dan sosialisasi, pengetahuan tersebut dibagikan ke masyarakat Desa Sidomulyo agar dapat berkembang bersama dan dapat melayani wisatawan dengan maksimal. Pemberdayaan juga dilakukan oleh pihak akademisi yaitu keterlibatan dari mahasiswa jurusan ilmu budaya yang melakukan pengabdian di Desa Sidomulyo sehingga dapat memberikan ilmu mengenai tata cara berbahasa asing dan juga beberapa pelatihan.

Pada aspek kepemimpinan fasilitatif, kepala desa berfungsi sebagai pengambil keputusan yang menghubungkan kepentingan para aktor, sementara Dinas Pariwisata berperan dalam penguatan kapasitas. Pola ini konsisten dengan Kirana dan Artisa (2020) yang menekankan peran pemerintah daerah dalam membangun komunikasi dengan aktor bisnis dan memberdayakan kelompok sadar wisata. Namun, kasus Tumpak Sewu menunjukkan bahwa kepemimpinan fasilitatif tidak cukup dipahami sebagai kewenangan formal untuk menyetujui kegiatan. Kepemimpinan juga berfungsi sebagai penghubung antara kebutuhan kapasitas masyarakat, tuntutan keselamatan wisatawan, dan kebutuhan promosi digital. Hal ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan dalam kolaborasi destinasi wisata perlu bekerja lintas fungsi, bukan hanya pada pengambilan keputusan administratif.

D. Proses Kolaborasi

1. Dialog Tatap Muka

Semua tata kelola kolaboratif dibangun diawali dengan dialog tatap muka antara para pemangku kepentingan. Komunikasi dalam dialog diperlukan bagi para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi peluang untuk saling menguntungkan. Dalam mengelola suatu tempat wisata, perlu adanya sebuah kesiapan dari pihak pengelola. Disini diperlukan adanya keterlibatan dari Dinas Pariwisata untuk menjadi fasilitator bagi teman-teman pengelola untuk

mengajarkan dasar-dasar dalam kepariwisataan. Dinas Pariwisata berperan sebagai pihak yang menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi teman-teman pengelola guna meningkatkan kualitas SDM. Selain kesiapan dalam menghadapi wisatawan yang akan datang ke tempat wisata, pengelola juga wajib untuk meyakinkan bahwa tempat wisata tersebut merupakan tempat yang aman untuk dikunjungi. Oleh karena itu, peran dari pihak swasta sebagai penyedia asuransi jiwa sangat diperlukan. Ketua Pokdarwis bekerja sama dengan Askrindo untuk membantu mereka menjamin perlindungan terhadap keselamatan seluruh pengunjung melalui asuransi jiwa. Keterlibatan dari pihak akademisi juga tidak kalah pentingnya dan memiliki peran tersendiri. Adanya kegiatan pengabdian mahasiswa seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini menjadi kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk berkolaborasi dan bertukar ilmu dengan mahasiswa yang berdampak pada pengembangan wisata. Pemanfaatan *media online* menjadi sebuah kebutuhan tersendiri untuk memperkenalkan ke dunia luar tentang tempat wisata yang dikelola saat ini. Bapak Abdul Karim selaku Ketua Pokdarwis menyatakan bahwa berkat *media online* juga akhirnya banyak wisatawan yang berdatangan ke Wisata Air Terjun Tumpak Sewu.

Temuan mengenai dialog tatap muka memperlihatkan bahwa komunikasi telah menjadi sarana pertukaran pengetahuan, pelatihan, dan koordinasi antara pengelola, pemerintah, swasta, akademisi, dan media. Hal ini sejalan dengan Kirana dan Artisa (2020) yang menempatkan komunikasi efektif sebagai prasyarat agar para aktor dapat mengoptimalkan perannya. Namun, dibandingkan dengan temuan Agasinta *et al.* (2024) tentang masih lemahnya komunikasi dan sumber daya dalam kolaborasi Museum Kota Lama Semarang, kasus Tumpak Sewu menunjukkan bahwa komunikasi lintas aktor telah menghasilkan kegiatan konkret seperti pelatihan, perlindungan asuransi, pengabdian masyarakat, dan promosi. Persamaan keduanya terletak pada pentingnya komunikasi, sedangkan perbedaannya terdapat pada bentuk hasil yang muncul dari komunikasi tersebut.

2. Membangun Kepercayaan

Ansell dan Gash mengungkapkan bahwa proses kolaboratif bukan hanya tentang negosiasi tetapi juga tentang membangun kepercayaan diantara para pemangku kepentingan. Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pariwisata turun langsung ke Pokdarwis untuk memberikan arahan terkait bagaimana mengelola sebuah tempat wisata melalui pelatihan-pelatihan. SDM juga perlu diperkuat secara internal dari Pokdarwis itu sendiri, dengan anggota satu sama lain agar dapat terwujud tujuan bersama. Komunikasi yang intensif menjadi penting dilakukan oleh setiap anggota dalam Pokdarwis agar tercapai suatu kepercayaan bersama. Kemudian dari pihak swasta, yaitu Askrindo berupaya menyediakan asuransi bagi seluruh pengunjung tanpa terkecuali untuk menjamin keselamatan mereka selama di tempat wisata Air Terjun Tumpak Sewu. Dengan begitu, Pokdarwis bisa mendapatkan kepercayaan dari wisatawan bahwa tempat wisata tersebut sangat aman untuk dikunjungi, dan disisi lain pihak swasta dapat memperkenalkan asuransi kepada seluruh wisatawan. Lalu dari pihak akademisi, setiap kampus menerjunkan mahasiswanya ke lapang dengan tujuan agar dapat berbagi ilmu pengetahuan yang dimiliki mahasiswa kepada desa tempat mereka mengabdikan. Jika suatu desa ditetapkan sebagai salah satu lokasi pengabdian mahasiswa, maka daerah tersebut dianggap memiliki potensi. Apabila mahasiswa datang ke suatu desa, dengan niat mengabdikan, dan desa itu menerima dengan baik maka telah muncul kepercayaan satu sama lain. Munculnya suatu kepercayaan dari pihak akademisi, maka bisa menjadi dasar kolaborasi antara akademisi dengan masyarakat desa, salah satunya dalam pengembangan wisata alam. Rasa saling percaya juga muncul diantara Pokdarwis dengan *paratour travel* yang membawa tamu ke Wisata Air Terjun Tumpak Sewu. Jika suatu *tour travel* memasukkan suatu tempat wisata ke salah satu list kunjungan dalam tour mereka, artinya

mereka mempercayai bahwa tempat tersebut layak untuk dikunjungi wisatawan yang mereka bawa. Oleh karena itu, Pokdarwis harus bisa membuktikan kelayakan tersebut dengan segala bentuk layanan yang mereka bisa beri kepada wisatawan tersebut.

Proses membangun kepercayaan di Tumpak Sewu berlangsung melalui interaksi berulang, pemberian pelatihan, jaminan keselamatan, serta pengalaman kerja bersama. Temuan ini mendukung kerangka Ansell dan Gash bahwa kepercayaan merupakan bagian inti dari proses kolaboratif. Dalam konteks pariwisata, kepercayaan juga memiliki dimensi eksternal karena tour travel dan wisatawan perlu mempercayai kualitas dan keamanan destinasi. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan dalam collaborative governance pariwisata tidak hanya merupakan relasi antar lembaga, tetapi juga dapat berfungsi sebagai modal untuk memperluas jejaring pasar destinasi.

3. Komitmen Pada Proses

Komitmen ini berkaitan dengan pengakuan dari masing-masing *stakeholders* bahwa mereka saling memiliki ketergantungan dan keterbukaan untuk mengeksplorasi keuntungan bersama. Komitmen ini sangat berpengaruh untuk dapat mencapai tujuan. Komitmen yang terlihat dalam kolaborasi pengembangan Wisata Air Terjun Tumpak Sewu sangat kuat. Dimana anggota internal dari Pokdarwis itu sendiri dapat dengan sadar melakukan gotong royong dan memperhatikan segala bentuk perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kenyamanan wisatawan. Namun ternyata, berkomitmen selama berkemajuan dalam pengembangan wisata ini memiliki kendala pada internal dari Pokdarwis itu sendiri. Kemudian komitmen dengan pihak swasta terkait kerjasama mengenai penyediaan asuransi, juga telah dilakukan dengan maksimal. Dimana pihak Askrindo dengan Pokdarwis berkomitmen untuk bersama menjaga keselamatan dan kenyamanan pengunjung melalui penyediaan asuransi tersebut. Kemudian komitmen yang dibangun antara Pokdarwis dengan pihak akademisi adalah komitmen bahwa pengembangan tempat wisata ini bisa dilakukan melalui transfer ilmu yang dimiliki oleh pihak akademisi, dan Pokdarwis mau untuk mempelajari hal tersebut.

Di sisi lain, para *travel agent* ini juga mau untuk berkomitmen bersama bahwa wisata alam di Kabupaten Lumajang ini layak untuk dikenalkan baik ke wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Hal ini akan sangat berdampak utamanya pada perputaran ekonomi di masyarakat Desa Sidomulyo.

Komitmen antarpihak terlihat dari gotong royong Pokdarwis, kerja sama asuransi, transfer pengetahuan dari akademisi, dan dukungan agen perjalanan. Namun, adanya kendala internal Pokdarwis menunjukkan bahwa komitmen dapat berbeda antar aktor dan tidak selalu bersifat stabil. Temuan ini relevan dengan Maulia dan Setiyono (2023) yang menunjukkan bahwa kolaborasi di Nglangeran menghadapi tantangan berupa regenerasi kepengurusan, kapasitas sumber daya manusia, dan penyalarsan visi. Kesamaannya menunjukkan bahwa keberlanjutan kolaborasi sangat dipengaruhi kapasitas internal organisasi pengelola, bukan hanya oleh hubungan antar aktor eksternal.

4. Pemahaman Bersama

Penyamaan persepsi perlu dilakukan untuk pelaksanaan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Pemahaman ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antar *stakeholders* dalam proses kolaborasi. Pemahaman antara pihak-pihak dalam kolaborasi ini dilakukan dalam beberapa forum pertemuan. Seperti forum diskusi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dengan Pokdarwis, kemudian forum pertemuan antara Pokdarwis dengan Askrindo, dan juga dalam beberapa kesempatan dengan pihak akademisi seperti mahasiswa KKN maupun

mahasiswa yang hendak melakukan penelitian. Forum-forum seperti itu di dalamnya pasti akan membahas terkait apa yang bisa dilakukan oleh masing-masing pihak untuk pengembangan wisata Air Terjun Tumpak Sewu ini. Yang menjadi kelemahan di sini adalah forum ini ada hanya ketika akan terjadi event-event besar saja. Tidak terdapat forum, khususnya di dalam Pokdarwis yang mana forum ini dilakukan secara rutin untuk melihat evaluasi kinerja dari Pokdarwis. Sehingga, komitmen yang dimiliki oleh pengurus itu sangat lemah. Seharusnya, ada forum yang dibuka khusus untuk membahas internal dari Pokdarwis itu sendiri, baik itu memuat kritik saran masukan, atau memuat apa yang mereka butuhkan, itu menjadi sangat penting.

Kelemahan utama yang muncul adalah belum adanya forum internal yang berlangsung rutin dan forum lintas aktor yang tidak selalu aktif di luar momentum kegiatan besar. Temuan ini memperkuat hasil Fadlurrahman et al. (2022) mengenai pentingnya struktur jaringan dan kejelasan pembagian kerja agar kontribusi aktor tidak berjalan sendiri-sendiri. Pada Tumpak Sewu, pemahaman bersama telah terbentuk pada kegiatan tertentu, tetapi belum sepenuhnya terlembagakan sebagai mekanisme evaluasi berkala. Karena itu, kebaruan empiris penelitian ini terletak pada penunjukan forum rutin sebagai kebutuhan penting untuk mengubah kolaborasi yang bersifat situasional menjadi proses yang lebih berkelanjutan.

5. Hasil Sementara

Pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengembangan Wisata Air Terjun Tumpak Sewu menghasilkan sebuah pencapaian baru dari wisata ini yaitu mendapatkan penghargaan Anugerah Wisata Jawa Timur 2018, penghargaan Anugerah Pesona Indonesia 2017, dan penghargaan Contoh Wisata Berbasis Komunitas (2025). Deretan penghargaan tersebut didapatkan dari keterlibatan beberapa pihak yang memiliki satu tujuan yang sama yaitu mengembangkan Wisata Air Terjun Tumpak Sewu. Sudah nampaknya hasil sementara dalam kolaborasi ini dapat membantu dalam mencari evaluasi dalam pelaksanaannya agar dapat dijadikan perbaikan proses untuk kedepannya. Pencapaian yang didapatkan oleh wisata ini tidak lepas dari peran media dalam mempromosikan wisata ini kepada seluruh khalayak masyarakat. Sebagaimana yang kita tahu, bahwa digitalisasi modern saat ini sangat mengambil peran dalam kehidupan manusia. Media dapat menjangkau bahkan ke lini masyarakat terjauh untuk memperlihatkan bagaimana keindahan wisata ini. Yang akhirnya membuat banyak sekali masyarakat untuk memutuskan berkunjung.

Hasil sementara berupa penghargaan dan meningkatnya visibilitas destinasi menunjukkan adanya manfaat dari proses kolaboratif. Namun, temuan ini perlu dibaca bersama studi Maulia dan Setiyono (2023), yang menunjukkan bahwa digitalisasi di Nglanggeran berkontribusi terhadap peningkatan kunjungan, pemasaran, lapangan kerja, dan ekonomi masyarakat, tetapi tetap disertai tantangan distribusi manfaat dan kapasitas pengelola. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan eksposur dan kunjungan tidak dengan sendirinya menjadi indikator tunggal keberhasilan kolaborasi. Dalam kasus Tumpak Sewu, hasil kolaborasi perlu diikuti penguatan kelembagaan dan mekanisme distribusi manfaat agar capaian promosi dapat diterjemahkan menjadi manfaat yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat lokal.

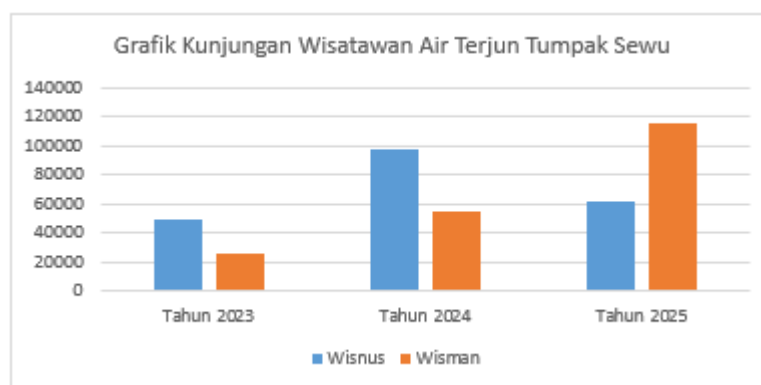
E. Outcome

Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, swasta, akademisi, dan media dalam pengelolaan suatu tempat wisata menghasilkan pengembangan destinasi yang lebih terarah dan berkelanjutan. Pemerintah berperan dalam penyediaan regulasi, infrastruktur, dan dukungan kebijakan, sementara pihak swasta menghadirkan investasi serta inovasi layanan wisata. Masyarakat lokal turut berkontribusi melalui penyediaan produk budaya, jasa pemandu, serta

usaha mikro yang memperkaya pengalaman wisatawan. Akademisi memberikan kajian ilmiah terkait pengelolaan lingkungan, strategi pemasaran, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sedangkan media membantu mempromosikan destinasi secara luas sehingga meningkatkan visibilitas wisata.

Outcom elain dari kolaborasi ini adalah meningkatnya kualitas layanan dan daya tarik destinasi wisata. Dengan adanya pelatihan dari akademisi dan dukungan pemerintah, masyarakat memperoleh keterampilan dalam pelayanan wisata, pengelolaan homestay, serta pengembangan produk lokal. Pihak swasta membantu dalam penyediaan fasilitas asuransi, sementara media menyebarluaskan informasi mengenai keunikan destinasi tersebut. Sinergi ini menciptakan pengalaman wisata yang lebih nyaman, aman, dan menarik bagi pengunjung.

Selain itu, kolaborasi lima pihak tersebut juga berdampak pada peningkatan ekonomi lokal dan keberlanjutan lingkungan. Pendapatan masyarakat meningkat melalui peluang usaha baru, seperti kuliner, kerajinan, dan jasa wisata. Pemerintah bersama akademisi memastikan pengelolaan lingkungan tetap terjaga melalui penerapan konsep wisata berkelanjutan, sedangkan media turut mengedukasi wisatawan mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian. Dengan demikian, kolaborasi multipihak ini tidak hanya meningkatkan kunjungan wisata, tetapi juga menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan kelestarian destinasi.



Sumber: Data Sekunder (2025)

Peningkatan drastis kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2025 ke Air Terjun Tumpak Sewu dapat dijelaskan oleh semakin kuatnya eksposur global melalui media sosial dan platform digital perjalanan. Dalam beberapa tahun terakhir, foto dan video panorama Tumpak Sewu yang unik dengan formasi air terjun menyerupai tirai raksasa menjadi viral di Instagram, TikTok, dan YouTube. Konten yang dibuat oleh travel *influencer* dan wisatawan asing memperluas jangkauan promosi secara internasional. Efek viral ini mendorong peningkatan minat kunjungan karena calon wisatawan melihat langsung pengalaman autentik dan visual yang menarik, sehingga Tumpak Sewu masuk dalam daftar destinasi yang wajib dikunjungi di Indonesia. Selain itu, peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara juga dipengaruhi oleh kemudahan akses informasi dan perencanaan perjalanan. Wisatawan asing kini dapat dengan mudah menemukan rute menuju lokasi, estimasi biaya, paket tur, serta tingkat kesulitan trekking melalui ulasan online dan platform perjalanan. Informasi yang bersifat pengalaman langsung dari wisatawan lain meningkatkan rasa aman dan kepercayaan untuk berkunjung. Ditambah dengan adanya paket perjalanan yang menggabungkan Tumpak Sewu dengan destinasi populer di Jawa Timur seperti kawasan Bromo dan Ijen, arus wisatawan internasional ke Lumajang semakin meningkat secara signifikan. Faktor lain yang turut mendorong lonjakan kunjungan

pada tahun 2025 adalah peningkatan pengelolaan destinasi dan fasilitas wisata. Perbaikan jalur trekking, penambahan pemandu lokal, sistem tiket yang lebih tertata, serta peningkatan pelayanan terhadap wisatawan asing membuat pengalaman berkunjung menjadi lebih nyaman.

Dari grafik kunjungan wisatawan tersebut, bisa dikatakan bahwa media membawa pengaruh cukup besar, utamanya dalam menarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Wisata Air Terjun Tumpak Sewu. Media ini bisa berasal dari beberapa hal, yang pertama media televisi. Media televisi yang sempat bekerja sama waktu itu berasal dari Trans 7 dan juga TVRI. Kedua media tersebut melakukan liputan secara menyeluruh di dalam area Wisata Air Terjun Tumpak Sewu yang kemudian disiarkan ke media televisi mereka. Melalui kegiatan tersebut, akhirnya secara nasional ditayangkan keindahan dan kemegahan dari Wisata Air Terjun Tumpak Sewu kepada seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah media sosial.

Peran *influencer* media sosial juga sangat besar dalam memperluas jangkauan promosi destinasi. *Influencer* yang memiliki banyak pengikut dapat memperkenalkan tempat wisata melalui konten seperti vlog atau foto. Konten yang menarik dapat membangun rasa ingin tahu pengikut terhadap destinasi yang dikunjungi. Dalam konteks *collaborative governance*, posisi *influencer* dapat dipahami sebagai aktor komunikasi digital yang melengkapi peran media dalam memperluas jangkauan informasi wisata.

Ada banyak faktor pendorong mengapa wisata ini mengalami lonjakan pengunjung yang cukup drastis, utamanya wisatawan mancanegara. Biasanya, turis mancanegara berminat untuk melakukan trip wisata apabila *tour travel* yang akan mereka gunakan merupakan *tour travel* yang terpercaya dan memiliki list tempat wisata yang menarik. Untuk meyakinkan para wisatawan, pihak *tour travel* biasanya sering memposting testimoni dokumentasi dari pengunjung lain, ataupun memperkenalkan terlebih dahulu wisata-wisata yang mereka tawarkan. Media yang mereka gunakan untuk mendukung aktivitas tersebut tentunya media sosial. Karena media sosial sangat mempermudah langkah gerak mereka, tidak hanya secara nasional, tapi secara internasional sehingga mereka sangat mudah untuk mendapatkan tamu dari wisatawan mancanegara.

Pada tingkat outcome, penelitian ini menemukan keterkaitan antara kolaborasi multipihak, kualitas layanan, promosi, dan peluang ekonomi lokal. Temuan tersebut sejalan dengan Maulia dan Setiyono (2023) yang menemukan dampak positif digitalisasi terhadap kunjungan, pemasaran, lapangan kerja, dan ekonomi masyarakat di Nglanggeran. Akan tetapi, penelitian ini memperlihatkan ciri yang lebih spesifik pada destinasi air terjun: media bukan hanya saluran promosi, tetapi diposisikan sebagai aktor yang berinteraksi dengan pengelola, pemerintah, dan masyarakat dalam menghasilkan visibilitas destinasi. Posisi media sebagai aktor aktif inilah yang memperluas pembacaan *collaborative governance* dari sekadar pembagian peran antar lembaga menuju pengelolaan ekosistem promosi digital destinasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan destinasi wisata alam memerlukan keterlibatan multipihak yang terintegrasi melalui model kolaborasi *penta-helix* yang melibatkan pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan media. Kolaborasi tersebut menjadi penting untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi wisata, meningkatkan kualitas layanan, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Dinamika kolaborasi yang terbentuk menunjukkan adanya interaksi kepentingan, peran, dan kontribusi yang berbeda dari masing-masing aktor, yang apabila dikelola secara sinergis dapat menghasilkan tata kelola pariwisata yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, keberhasilan *collaborative governance* sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang intensif, kepercayaan antar

aktor, kejelasan pembagian peran, serta komitmen bersama dalam mencapai tujuan pengembangan destinasi wisata. Dalam dunia digitalisasi seperti saat ini, media sangat penting untuk dilibatkan utamanya dalam pengembangan suatu objek wisata. Dampak yang ditimbulkan dari keterlibatan media itu sangat besar, dimana kita dapat memperkenalkan wisata ini bahkan sampai ke dunia internasional tanpa harus mengeluarkan tenaga dan biaya berlebih. Dengan memanfaatkan media dengan baik, objek wisata bisa menarik lebih banyak wisatawan untuk datang dan menikmati keindahan alam yang dimiliki. Pengelolaan Wisata Air Terjun Tumpak Sewu melalui pendekatan *collaborative governance* berpotensi meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, memperkuat kelembagaan pengelola wisata, serta mendorong promosi destinasi secara lebih luas. Namun demikian, dinamika kolaborasi juga berpotensi menghadapi berbagai tantangan seperti perbedaan kepentingan antar aktor, keterbatasan koordinasi, dan belum optimalnya keterlibatan beberapa pihak dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme kolaborasi yang berkelanjutan agar pengelolaan wisata dapat berjalan secara partisipatif, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Secara teoretis, temuan ini menunjukkan bahwa model *collaborative governance* Ansell dan Gash dapat menjelaskan dinamika pengelolaan wisata alam ketika proses kolaborasi berinteraksi dengan ekosistem promosi digital. Secara praktis, pengelolaan Tumpak Sewu memerlukan forum koordinasi rutin, pembagian peran yang jelas, penguatan kapasitas Pokdarwis, dan mekanisme kerja sama media digital yang akuntabel.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan kepada pemerintah daerah untuk memperkuat regulasi dan mekanisme koordinasi antar *stakeholders* dalam pengelolaan Wisata Air Terjun Tumpak Sewu agar kolaborasi yang terbentuk lebih terstruktur dan berkelanjutan. Pemerintah juga perlu memfasilitasi forum komunikasi rutin yang melibatkan seluruh aktor *penta-helix* guna menyelaraskan kepentingan, memperjelas pembagian peran, serta mengatasi potensi konflik dalam pengelolaan destinasi wisata. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan pengelola wisata perlu dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan dukungan infrastruktur yang memadai. Media menjadi salah satu aktor yang berkontribusi besar pada kolaborasi ini. Berdasarkan temuan mengenai kuatnya peran promosi digital, pemerintah dan Pokdarwis dapat mempertimbangkan kerja sama yang terstruktur dengan *influencer* lokal untuk mendukung promosi Wisata Air Terjun Tumpak Sewu. Kesepakatan kerja sama tersebut dapat memuat peran *influencer* untuk memperkenalkan wisata melalui konten digital dalam jangka waktu tertentu. Jadi *influencer* ini tidak hanya menjadi pengunjung biasa, namun kehadirannya dilegalkan sebagai bentuk pengakuan dari pemerintah daerah. Bagi masyarakat dan pelaku usaha, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam menjaga kualitas layanan wisata, pelestarian lingkungan, serta pengembangan produk lokal yang bernilai ekonomi. Akademisi diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui kajian ilmiah, pendampingan, serta rekomendasi kebijakan berbasis penelitian. Sementara itu, media diharapkan dapat berperan dalam memperluas promosi wisata sekaligus memberikan edukasi kepada wisatawan mengenai pentingnya pariwisata berkelanjutan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dapat mengkaji lebih mendalam mengenai efektivitas *collaborative governance* serta mengukur dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan, ekonomi lokal, dan kelembagaan pengelolaan wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Agasinta, I. I., Subowo, A., & Santoso, R. S. (2024). Analisis *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Objek Wisata Museum Kota Lama Semarang. *Journal of Management & Public Policy*, 13(2), 1–14.
- Ardiansyah, F. W., Purnaweni, H., & Priyadi, B. P. (2023). Analisis *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang Kecamatan Purwodadi *Journal of Management & Public Policy*, 12(3), 741–756. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/39942%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/39942/29336>
- Ariesmansyah, A., Ariffin, R. H., & Respati, L. A. (2023). *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal El-Riyasah*, 14(1), 58–72. <https://doi.org/10.31258/jkp.11.1.p.7-12>
- Astuty, K., Nurzam, N., Sudarsono, A., Kurniawan, K., & Novitasari, M. (2023). Pengelolaan Wisata Berbasis Kearifan Lokal Dengan Menggunakan Media Sosial Sebagai Promosi di Desa Belitar Seberang - Curup. *Jurnal Dehasen Mengabdi*, 2(2), 89–94. <https://doi.org/10.37676/jdm.v2i2.4633>
- Asurah, W., & Wibawani, S. (2023). *Collaborative Governance* Pengembangan Objek Wisata Air Embung “Bandung Bondowoso” Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Darma Agung*, 31(3), 167–177. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i3.3206>
- Bahiyah, C., & Hidayat, W. R. (2018). Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata Di Pantai Duta Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2, 95–103.
- Creswell, J. W. (2014). Qualitative and Quantitative Research Design. In *Social Research Methodology*. (161-200). <https://doi.org/10.4324/9781032624860-9>.
- Fadlurrahman, Kurniasih, Y., & Winanta, R. A. (2022). *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata di Desa Ngargogondo Kecamatan Borobudur. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(2), 29–35. <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i2.2104>
- Habibah, E. N. (2021). *Collaborative Governance*, Magelang: Pustaka Rumah Cinta.
- Hamka, Nadia, Y., Supardi, H., Namora, F., & Devi Jasti, F. (2022). *Collaborative Governance* Model Dalam Membangun Sustainable Integrated Ecotourism Di Lmdh Puncak Lestari Cisarua Kabupaten Bogor. *Jurnal Sumber Daya Aparatur*, 4(1).
- Islamy, L. O. S., Andriani, R., & Hanafi, E. P. (2020). Model *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Kainawa: Jurnal Pembangunan & Budaya*, 2(1), 81–94. <https://doi.org/10.46891/kainawa.2.2020.81-94>
- Jaya, R. (2024). *Collaborative Governance*, Konsep dan Prakteknya Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Kediri: CV. Kreator Cerdas Indonesia.
- Kirana, C. A. D., & Artisa, R. A. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis *Collaborative Governan* cedi Kota Batu. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 68–84. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i1.3119>
- Maulia, E. I., & Setiyono, B. (2023). *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran: Analisis Dampak Digitalisasi Desa Wisata. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(1), 404–418. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/42391/30457>
- Rozikin, M., Wismanu, R. E., & Muttaqin, A. (2019). Model collaborative governance dalam analisis pengembangan potensi pariwisata berbasis indigenous tourism. *Media Bina Ilmiah*, 14(4), 2357–2366. <https://doi.org/10.33758/mbi.v14i4.345>

- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Ni Made Angeliana Suwantara Putri, Putu Eka Purnamaningsih, & Ni Wayan Supriliyani. (2024). *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Desa Wisata Pinge Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. *Business and Investment Review*, 2(1), 47–57. <https://doi.org/10.61292/birev.92>
- Raharjo, W. B. (2022). *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Wisata Budaya Keraton Kacirebonan Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, 0, 1–23.
- Suta, P. W. P., & Mahagangga, I. G. A. O. (2018). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 5(1), 144. <https://doi.org/10.24843/jdepar.2017.v05.i01.p26>
- Syahputra, M. F., & Tukiman. (2022). *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Wilayah Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pada Kawasan Bantaran Sungai Jagir Wonokromo Kota Surabaya. *Jurnal Noken*, 8(8), 1–14. <https://doi.org/10.56304/s0040363622080021>
- Tumija, & Bagus Jadog. (2022). Pengelolaan Objek Wisata Pantai Oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 9, 23–39.
- Utami, A. D. M., Hariani, D., & Sulandari, S. (2021). *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Desa Wisata Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. *Journal of Management & Public Policy*, 10(3), 281–298.
- Wahyudin, C., Oetje Subagdja, & Abubakar Iskandar. (2023). Desain Model *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Pengurangan Penggunaan Plastik. *Jurnal Governansi*, 9(2), 151–162. <https://doi.org/10.30997/jgs.v9i2.8004>
- Wijaya, A. A. M., Sa'ban, L. M. A., & Nastia, N. (2023). Peluang dan Tantangan *Collaborative Governance* Dalam Kebijakan Pariwisata Daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 29(3), 214–234. <https://doi.org/10.33509/jan.v29i3.2681>
- Pemerintah Kabupaten Lumajang. (2016). *Buku Data Ekonomi Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016*.